

BAB I

PENDAHULUAN

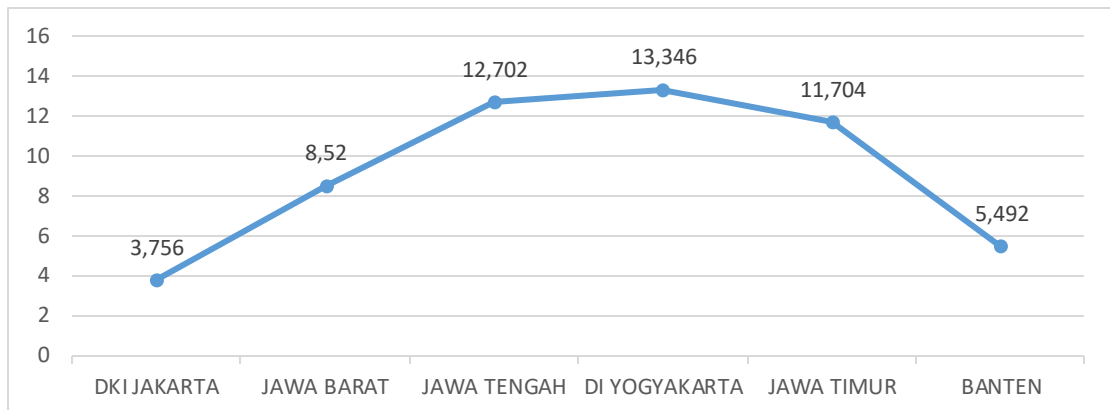
A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan istilah yang mulai muncul ketika seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan ekonominya, dan dianggap tingkat kemakmurannya dibawah standar hidup tertentu. Kemiskinan banyak diartikan sebagai keadaan dimana orang tersebut mengalami kekurangan pendapatan dan barang untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Kemiskinan juga bisa disebut dengan kurangnya kesejahteraan, secara umum kemiskinan dikaitkan tentang kepunyaan atau hak untuk barang, jadi masyarakat miskin yang disebut sebagai masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan atau konsumsi yang cukup untuk membuat mereka berada pada diatas batas minimal kategori sejahtera. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut merupakan hal yang tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah pendidikan ataupun tingkat kesehatan bagi masyarakat setempat. Kemiskinan sebagai masalah kompleks yang memiliki keterkaitan dengan antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang, lokasi, geografis, gender maupun lokasi lingkungan yang ditempati.

Bagi Indonesia, kemiskinan merupakan persoalan yang sudah sejak lama melekat dibangsa ini, tanda-tanda akan berakhir pun belum menunjukkan keberhasilan dalam menanggulangi hal tersebut. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat statistika, pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin dibawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta

orang atau 9,82 persen yang berkurang sebesar 633,2 ribu orang yang dibandingkan kondisi tahun 2017 sebesar 26,58 juta atau setara dengan 10,12 persen. Tetapi angka tersebut masih cukup besar dibandingkan dengan negara-negara lain yang perekonomiannya lebih maju. Kondisi masyarakat yang hidup dalam lingkaran kemiskinan pada umumnya masih mengalami keterlambatan gizi, kesehatan yang buruk, buta huruf masih tinggi dipelosok daerah serta lingkungan yang buruk dan ketersediaan infrastruktur yang kurang untuk melayani publik (Joniadi Arius, 2012).

Todaro *dalam* Barat dan Rosa, 2014 mengungkapkan bahwa tujuan utama dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai pandangan ekonomi baru yang tidak hanya pertumbuhan PDRB saja yang menjadi tujuan semata, tetapi juga pengentasan kemiskinan, menanggulangi ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan pekerjaan yang termasuk dalam upaya memajukan dan mengembangkan perekonomian. Sehingga masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang harus segera diatasi. Angka kemiskinan agregat secara makro juga sering dimaknai dengan pengukuran perkembangan dan pembangunan ekonomi suatu bangsa, untuk memperhitungkan suatu kemiskinan dapat menggunakan cara dengan pendekatan keahlian untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tingkat kemiskinan juga dianggap sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan harian seperti makanan atau non makanan, yang berimplementasi pada garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin.



Sumber: BPS data diolah, 2020

Gambar 1.1 Rata-rata Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2014-2018

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2014 sampai 2018 memiliki rata-rata 3,756 persen. Pencapaian ini merupakan angka kemiskinan terendah dibandingkan wilayah provinsi lainnya, dikarenakan dari segi pendidikan maupun kesehatan serta kesempatan kerja masih menjadi program utama untuk kinerja pemerintah. Untuk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 sampai 2018 mempunyai rata-rata 8,52 persen. Sedangkan tahun 2014 sampai 2018 di Provinsi Jawa Tengah rata-ratanya 12,702 persen. Kemudian, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 sampai 2018 memiliki rata-rata 13,346 persen. Tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa, bisa saja ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pendidikan, kesehatan bahkan penyediaan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, provinsi Jawa Timur tahun 2014 hingga 2018 rata-ratanya sebesar 11,704 persen, dan Provinsi Banten tahun 2014 hingga 2018 rata-ratanya mencapai 5,492 persen. Pemerintah pusat maupun daerah tetap mengusahakan untuk melakukan pengentasan kemiskinan bahkan masalah kemiskinan merupakan program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah tiap

provinsi di Pulau Jawa, tetapi untuk strategi perencanaan yang diambil masih juga belum ada hasil yang maksimal. Tiap daerah masih terjadi ketimpangan antara rencana dengan pencapaian tujuan dikarenakan kebijakan dan program yang diambil masih berorientasi pada program sektoral. Oleh sebab itu, suatu progress untuk menanggulangi kemiskinan diperlukan pemecahan masalah kemiskinan yang logis, dan terstruktur sehingga dapat menyelesaikan masalah secara optimal.

Permasalahan kemiskinan yang terjadi di Provinsi-provinsi di Pulau Jawa terutama tidak meratanya persentase penduduk miskin, oleh karena itu perlunya diketahui faktor-faktor yang berperan dalam peningkatan jumlah penduduk miskin. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang berperan dalam memunculkan kemiskinan adalah tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan pengangguran. Salah satu indikator pengukuran dari tingkat pendidikan adalah dengan Angka Melek Huruf (AMH), sedangkan untuk tingkat kesehatan yaitu dengan Angka Harapan Hidup.

Angka melek huruf juga dapat menjadi indikator untuk bahan pertimbangan pada perkembangan pendidikan penduduk. Jika angka melek huruf meningkat, maka semakin tinggi pula derajat sumber daya manusianya. Penduduk yang dapat membaca dan menulis diduga memiliki kapasitas dan keahlian karena dapat menyerap ilmu atau informasi baik lisan maupun tulisan. Pengentasan kemiskinan juga berpengaruh di segi kesehatan masyarakat yang baik dari tingkat kesehatan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara langsung atau tidak langsung. Menurunnya tingkat kesehatan pada anak akan berdampak pada kesediaan anak untuk belajar disekolah, absen sekolah atau tingkat bolos disekolah dan kurangnya

kedisiplinan waktu saat menerima pembelajaran sehingga berpengaruh pada kemungkinan anak menamatkan sekolah tepat waktu dan mendapatkan pekerjaan yang efektif dibandingkan dengan anak yang sehat.

Peneliti mengambil kasus kemiskinan di Pulau Jawa dikarenakan jumlah penduduk yang semakin bertambah memungkinkan tingkat kemiskinan akan terus meningkat serta masih adanya ketidakseimbangan antara pelayanan pendidikan dan kesehatan yang kurang akibatnya angka kemiskinan juga terus menjadi permasalahan utama. Jumlah penduduk yang semakin bertambah juga menyebabkan permintaan tenaga kerja meningkat namun tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai oleh pemerintah atau swasta. Serta adanya ketimpangan antar wilayah yang tiap daerahnya mempunyai perbedaan program kebijakannya masing-masing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki tujuan apakah kemiskinan di Pulau Jawa dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dengan salah satu indikator yaitu angka melek huruf, tingkat kesehatan yaitu angka harapan hidup serta tingkat pengangguran yang menjadi persoalan utama tiap tahun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada uraian latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini diantaranya :

1. Bagaimana pengaruh angka melek huruf secara parsial berpengaruh terhadap kemiskinan tiap provinsi di Pulau Jawa tahun 2014 - 2018?
2. Bagaimana angka harapan hidup secara parsial berpengaruh terhadap kemiskinan tiap provinsi di Pulau Jawa tahun 2014 - 2018?

3. Bagaimana tingkat pengangguran secara parsial terhadap kemiskinan tiap provinsi di Pulau Jawa tahun 2014 - 2018?

C. Batasan Masalah

Batasan Masalah berfungsi untuk menghindari adanya penyimpangan atau meluasnya suatu pokok masalah agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan yang mencapai tujuan. Peneliti dalam hal ini membatasi permasalahan mengenai persentase penduduk miskin yang terdapat tiap Provinsi di Pulau Jawa yang dipengaruhi oleh Angka Melek Huruf, Angka Harapan Hidup, dan Tingkat Pengangguran pada tahun 2014-2018.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh angka melek huruf terhadap kemiskinan tiap provinsi di Pulau Jawa tahun 2014 – 2018.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh angka harapan hidup terhadap kemiskinan tiap provinsi di Pulau Jawa tahun 2014 – 2018.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan tiap provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2018.

E. Manfaat Penelitian

- 1) Memberikan masukan pemikiran kepada para pengambil kebijakan dalam merencanakan langkah-langkah dan strategi-strategi untuk pengentasan

kemiskinan dengan mengurangi pengangguran, meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan SDM yang bermutu.

- 2) Bagi masyarakat dan organisasi terkait, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan masukan untuk mengurangi kemiskinan di Pulau Jawa.

